

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA KELURAHAN TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MADIDIR KOTA BITUNG

Syela Melly Aprilia Karundeng, George M. V. Kawung, Ita Pingkan F. Rorong

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Universitas Sam Ratulangi

Email: syelamerungk390@gmail.com, georgekawung@unsrat.ac.id, itapingkan@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggunaan dana kelurahan terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Madidir. Masalah pokok yang terjadi adalah anggaran dana kelurahan yang diterima masyarakat telah terealisasi dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat namun hanya dimanfaatkan selama tahun 2019 dan 2020 karena pada tahun 2021 anggaran dana kelurahan telah dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Salah satu bentuk upaya pemerintah dengan membangun daerah adalah penyaluran dana kelurahan didalam membangun sarana, prasaran bahkan sumber daya manusia.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia dan bersumber dari kantor Kecamatan Madidir. Data yang tercakup dalam penelitian ini adalah data dana kelurahan yang di peruntukan bagi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Madidir Tahun 2019 dan Tahun 2020.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan penyaluran dana kelurahan dikatakan berhasil didalam pengimplementasian terutama di bidang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat

Kata Kunci : Dana Kelurahan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the use of kelurahan funds for infrastructure development and community empowerment in the Madidir sub-district. The main problem that has occurred is that the urban village budget received by the community has been properly realized and has had a positive impact on the community, but it has only been used during 2019 and 2020 because in 2021 the village budget has been diverted to handling Covid-19.

One form of the government's efforts to develop regions is the distribution of village funds in building facilities, infrastructure and even human resources.

The data used in this study are secondary data obtained based on available data and sourced from the Madidir District office. The data included in this study are urban village funds data which are intended for infrastructure development and community empowerment in Madidir District in 2019 and 2020

The findings of the research show that the planning and distribution of kelurahan funds is said to be successful in implementation, especially in the areas of infrastructure and community empowerment

Keywords: Kelurahan Fund, Infrastructure and Community Empowermen

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia semenjak di berlakukannya otonomi daerah sebagai dasar pelaksanaan, memberikan daerah kewenangan luas nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan dampak positif apabila Pemerintah Daerah melibatkan

masyarakat dalam pembangunan daerah dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing – masing daerah, yakni didalamnya kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan tujuan desentralisasi yaitu sebagai perwujudan demokrasi sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh pemerintah pusat dalam proses membangun wilayah kelurahan yang ada.

Adanya dana kelurahan membuat pemerintah Kecamatan Madidir terdorong untuk lebih mengembangkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada kelurahan dan masyarakatnya. Hal tersebut terbukti dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Penggunaan dana kelurahan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana yang diyakini diperlukan dalam menciptakan kualitas pelayanan yang berkualitas sehingga dapat mengantisipasi permasalahan pelayanan pada masyarakat. Anggaran dana kelurahan yang digelontorkan di Kecamatan Madidir yang digunakan dalam program peningkatan pelayanan kecamatan yang meliputi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat diatur berdasarkan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan, dimana prioritas pembangunan akan diberikan alokasi dana yang lebih besar sehingga pada penggunaan dana alokasi kelurahan pertahunnya telah sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan.

Pada hakekatnya pembangunan adalah upaya perbaikan secara terencana dari satu situasi kesituasi lainnya yang dianggap lebih baik (Syauckani : 2004). implementasi pembangunan merupakan suatu ukuran bagi tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika sasaran atau tujuan itu tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan maka pekerjaan itu tidak efektif. Sehubungan dengan implementasi pembangunan tersebut, maka dukungan dan bantuan dari pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan kelurahan itu sendiri sangat berarti.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam proses pembangunan, baik fisik maupun non fisik pada daerah kelurahan maka perlu adanya perencanaan yang matang dan proses pelaksanaannya diserahkan kepada kepala kelurahan sebagai koordinator dan administrator pemerintahan kelurahan. Selain itu untuk dapat terwujudnya pembangunan kelurahan diperlukan adanya kemampuan Lurah dalam bekerja sama dengan perangkat Kelurahan dan masyarakat melalui lembaga-lembaga kelurahan. Sementara itu tujuan pembangunan fisik yang dilaksanakan di Kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir Kota Bitung adalah untuk tercapainya pelayanan dibidang pemerintahan dengan baik, yang sebagian besar bersifat pembangunan fisik maupun non fisik.

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh kelurahan dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dalam hal ini LPM merupakan mitra kerja pemerintahan kelurahan dibidang perencanaan pembangunan, yang menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat agar pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana dan berhasil dengan baik, dan pada hakikatnya melibatkan tiga faktor yaitu manusia dengan beragam perilakunya, faktor dana yang tergantung pada kemampuan keuangan negara, dan faktor alam yang sulit diramal. Oleh karena itu penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan pembangunan mungkin saja dapat terjadi. Dalam hal ini pengawasan perlu dilakukan sehingga penyimpangan secara lebih dini dapat segera diketahui, guna menghindari kerugian yang lebih besar.

Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok atau kegiatan kolektif yang harus melibatkan banyak orang atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, lebih efisien dan efektif (Affifuddin : 2010).

Dalam upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan kelurahan agar dapat terealisasi dengan baik, peran dari masyarakat terutama kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan tersebut. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat kelurahan akan pentingnya usaha-usaha sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan banyak tergantung pada kepemimpinan khususnya pada pemerintahan kelurahan, yang menjadi ujung tombak dalam

pelaksanaan pembangunan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan kelurahan khususnya kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir Kota Bitung.

Semenjak Kota Bitung mengalami masalah pasca dilanda virus covid-19, timbul berbagai dampak dari pandemi COVID-19 dalam perekonomian, di antaranya berhentinya sektor-sektor industri perdagangan, transportasi, jasa keuangan, dan industri. Selain itu pendapatan menurun, pemutusan hubungan kerja, pengangguran, daya beli masyarakat menjadi kecil, dan kebutuhan meningkat. Ada tiga dampak utama COVID-19 dalam kehidupan sosial masyarakat, yakni terhentinya aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, terputusnya interaksi dengan orang lain sebagai kodrat makhluk sosial, dan terganggunya rutinitas menjalankan ritual keagamaan sesuai dengan keyakinan setiap orang. Karena itu perlu adanya upaya dari pemerintah untuk menstabilkan kembali sistem perekonomian melalui kebijakan yang di terapkan dari pemerintah pusat yaitu dengan melakukan vaksinasi dan penggunaan masker di tempat umum agar kegiatan masyarakat bisa kembali berjalan dengan normal. Dan upaya tersebut dapat dikatakan berhasil karena melalui kebijakan ini kondisi perekonomian khususnya di Kota Bitung kembali berjalan dengan stabil. Berbagai macam upaya diberlakukan oleh pemerintah guna membangun kembali kondisi perekonomian yang stabil yakni dengan penyaluran anggaran secara spesifik di masyarakat, satu diantaranya adalah penyaluran dana kelurahan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang merupakan Dana Alokasi Umum Tambahan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada seluruh Kelurahan yang ada, termasuk di Kelurahan – kelurahan se Kecamatan Madidir Kota Bitung.

Jumlah Kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir Kota Bitung ada 8 Kelurahan yakni, Kelurahan Paceda, Kelurahan Madidir Unet, Kelurahan Madidir Ure, Kelurahan Madidir Weru, Kelurahan Kadoodan, Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Wangurer Timur, Kelurahan Wangurer Utara dan berikut anggaran Dana Kelurahan yang di peroleh :

Tabel 1.1
Anggaran Dana Kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir Kota Bitung
Tahun 2019-2020

Nama Kelurahan	Jumlah Anggaran		
	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Jumlah (Rp)
Paceda	917.748.526,00	458.400.000,00	1.376.148.526,00
Madidir Unet	1.074.518.884,00	1.123.286.000,00	2.197.804.884,00
Madidir Ure	919.011.684,00	452.400.000,00	1.371.411.684,00
Madidir Weru	939.011.684,00	452.400.000,00	1.391.411.684,00
Kadoodan	969.011.684,00	902.400.000,00	1.871.411.684,00
Wangurer Barat	1.074.518.884,00	638.400.000,00	1.712.918.884,00
Wangurer Timur	981.274.842,00	512.400.000,00	1.493.674.842,00
Wangurer Utara	872.643.263,00	437.400.000,00	1.310.043.263,00
Total	7.747.739.451,00	4.977.086.000,00	12.724.825.451,00

Sumber : Kantor Kecamatan Madidir

Tabel 1.1 menjelaskan jumlah anggaran belanja kelurahan - kelurahan di kecamatan Madidir di Tahun 2019 sebesar Rp. 7.747.739.451,00 dan untuk tahun 2020 tidak lebih besar dari yang di peroleh di tahun 2019, dan total anggaran yang di peroleh di tahun 2020 sebesar Rp. 4.977.086.000,00. Pada tahun 2019 Dana kelurahan yang diterima oleh Kelurahan Madidir Unet dan Kelurahan Wangurer Barat adalah paling besar jumlahnya dikarenakan luas wilayah dan jumlah penduduk dari kedua kelurahan tersebut yang banyak, sementara kelurahan Wangurer Utara menjadi kelurahan yang paling sedikit menerima dana kelurahan karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan 7 (tujuh) kelurahan lainnya. Sehingga total target belanja dana kelurahan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp.12.724.825.451,00,-

Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan dana kelurahan terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Kecamatan Madidir Kota Bitung ?
2. Bagaimanakah penerapan dana Kelurahan terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Madidir Kota Bitung ?
3. Apakah dana kelurahan dapat terlaksana secara efektif di Kecamatan Madidir Kota Bitung?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi dari dana kelurahan didalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Kecamatan Madidir Kota Bitung
2. Untuk mengetahui implementasi dari dana Kelurahan terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Madidir Kota Bitung.

3. Untuk mengetahui dana kelurahan dapat berjalan secara efektif di Kecamatan Madidir Kota Bitung.

Manfaat Penelitian

1. Hasil Penelitian ini kiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kelurahan pada Kecamatan Madidir Kota Bitung dalam mengelola dan penyaluran anggaran dana kelurahan agar benar-benar di gunakan untuk pembangunan fasilitas kelurahan serta membangun potensi sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Madidir.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengembangan keilmuan untuk peneliti selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan Dana Kelurahan.

LANDASAN TEORI

Pembangunan Ekonomi

Menurut (Todaro, 2011) pembangunan ekonomi yaitu proses multi dimensi yang melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional seperti halnya percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karenanya, manusia berperan cukup besar dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yaitu sebagai tenaga kerja, input pembangunan, dan konsumen hasil pembangunan itu sendiri.

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe, 2005:27)

Perencanaan Pembangunan Kelurahan

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011 : 33) perencanaan pembangunan desa/kelurahan merupakan suatu panduan atau model penggalian potensidan gagasan pembangunan desa/kelurahan yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Konsep ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia.

Pembangunan Infrastruktur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Pembangunan infrastruktur di desa/kelurahan harus di dasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Dalam membangun infrastruktur desa/kelurahan hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang di miliki oleh desa/kelurahan yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien.

Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa. Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57).

Implementasi

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Dana Kelurahan

Kelurahan secara yuridis formal diakui di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Berdasarkan ketentuan ini Kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Sedangkan Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran Teoritis



2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh langsung dari kantor Kecamatan Madidir di Kota Bitung. Tempat dan waktu dalam penelitian ini adalah Kelurahan - kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir Kota Bitung dan waktu penelitian bulan Februari 2022 - Oktober 2022.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

- a. Implementasi Dana Kelurahan : Merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Bitung yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang di gunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pembangunan Infrastruktur : Pembangunan fisik dari fasilitas publik seperti jalan, jembatan, drainase ataupun bangunan di kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir Kota Bitung
- c. Pemberdayaan Masyarakat : Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pendidikan dan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat yang ada di kelurahan di Kecamatan Madidir Kota Bitung

Metode Analisis

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan model analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:21) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Rosalina, 2012)

Efektifitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektifitas berfokus pada *outcome* atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi: 2007). Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:11): “Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.” Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan Efektifitas, sebagai berikut: “Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Output dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut. Dengan demikian untuk menganalisis efektifitas Pengelolaan Keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Output (Ratio Belanja)}}{\text{Input (Realisasi Pendapatan)}} \times 100 \%$$

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan menguraikan serta menerangkan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I. Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif yang menggambarkan, menjelaskan atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi serta yang dapat diungkapkan melalui bahan – bahan dokumenter .

Implementasi Dana Kelurahan dalam Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Madidir Kota Bitung

Penelitian ini dilakukan di 8 (delapan) Kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir Kota Bitung yang melaksanakan Program Dana Kelurahan serentak sejak Tahun 2019.

Implementasi Dana Kelurahan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Madidir Kota Bitung

Penggunaan dana kelurahan difokuskan pada pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan – kelurahan di Kecamatan Madidir Kota Bitung yang meliputi lingkungan pemukiman, pendidikan dan kebudayaan serta sarana prasarana pelengkap kelurahan lainnya.

Tabel 4.1
Anggaran Dana Kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir Kota Bitung
untuk Infrastruktur
Tahun 2019-2020

Nama Kelurahan	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Paceda	259.096.000	247.820.000	-	-
Madidir Unet	259.096.000	256.100.000	514.886.000	491.641.700
Madidir Ure	259.096.000	256.200.000	-	-
Madidir Weru	259.096.000	197.847.000	-	-
Kadoodan	259.096.000	228.350.000	420.000.000	400.500.000
Wangurer Barat	259.096.000	258.650.000	-	-
Wangurer Timur	259.096.000	208.530.000	-	-
Wangurer Utara	259.096.000	245.847.650	-	-
Kec. Madidir	2.072.768.000	1.899.344.650	934.886.000	892.141.700

Sumber Data : Kantor Kecamatan Madidir

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran dana kelurahan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.072.768.000,- pada tahun 2019, terealisasi sebesar Rp. 1.899.344.650,-. Pada tahun 2020 tidak lebih besar dari tahun sebelumnya dan hanya 2 (dua) kelurahan yang menerima alokasi Dana Kelurahan untuk pembangunan Infrastruktur yaitu Kelurahan Madidir Unet dan Kelurahan Kadoodan dengan nilai anggaran Rp. 934.886.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 892.141.700,-. Adapun Program Kegiatan Dana Kelurahan yang dilaksanakan di seluruh Kelurahan se Kecamatan Madidir tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.072.772.800,- dan realisasi Rp. 1.899.344.650,- adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Paceda

Kelurahan Paceda menggunakan dana kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan saluran dengan anggaran sejumlah Rp.50.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.49.500.000,- serta kegiatan pengadaan jalan dengan jumlah anggaran Rp.181.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.170.400.000,- juga belanja alat listrik dan elektronik sejumlah Rp.28.096.600 dan terealisasi sejumlah Rp.27.920.000,-

2. Kelurahan Madidir Unet

Kelurahan Madidir Unet menggunakan dana kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan melaksanakan kegiatan pengadaan bangunan air kotor dengan anggaran sejumlah Rp.205.096.600,- dan terealisasi sejumlah Rp.204.895.000,- serta belanja alat listrik dan elektronik sejumlah Rp.54.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.51.205.000,-

3. Kelurahan Madidir Ure

Kelurahan Madidir Ure menggunakan dana kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan melaksanakan kegiatan pengadaan gedung untuk pos jaga dengan anggaran sejumlah Rp.70.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.69.500.000,- serta kegiatan pengadaan bangunan pembuangan air kotor dengan jumlah anggaran Rp.127.500.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.127.500.000,- serta belanja pemeliharaan saluran dan peralatan kebersihan sejumlah Rp.61.596.600,- dan terealisasi sejumlah Rp.59.700.000,-

4. Kelurahan Madidir Weru

Kelurahan Madidir Weru menggunakan dana kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan melaksanakan kegiatan pengadaan jalan dengan anggaran sejumlah Rp.40.096.600,- dan terealisasi sejumlah Rp.37.905.000,- serta kegiatan pemeliharaan saluran dengan jumlah anggaran Rp.69.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.65.217.500,- serta belanja peralatan kebersihan sejumlah Rp.150.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.94.724.500,-

5. Kelurahan Kadoodan

Kelurahan Kadoodan menggunakan dana kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan melaksanakan kegiatan pengadaan jalan dengan anggaran sejumlah

Rp.69.096.600,- dan terealisasi sejumlah Rp.68.850.000,- serta kegiatan pengadaan bangunan pembuangan air kotor dengan jumlah anggaran Rp.160.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.159.500.000,-

6. Kelurahan Wangurer Barat

Kelurahan Wangurer Barat menggunakan dana kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan melaksanakan kegiatan pengadaan Bangunan Air Kotor dengan anggaran sejumlah Rp.165.721.600,- dan terealisasi sejumlah Rp.165.550.000,- serta belanja alat listrik dan elektronik sejumlah Rp.93.375.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.93.100.000,-

7. Kelurahan Wangurer Timur

Kelurahan Wangurer Timur menggunakan dana kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan melaksanakan kegiatan pengadaan Bangunan Air Kotor dengan anggaran sejumlah Rp.146.096.600,- dan terealisasi sejumlah Rp.145.700.000,- serta belanja alat listrik, elektronik dan peralatan kebersihan sejumlah Rp.113.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.62.830.000,-

8. Kelurahan Wangurer Utara

Kelurahan Wangurer Utara menggunakan dana kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan melaksanakan kegiatan pengadaan jalan dengan anggaran sejumlah Rp.104.096.600,- dan terealisasi sejumlah Rp.98.828.500,-, kegiatan pengadaan bangunan pembuang pengaman dengan anggaran sejumlah Rp.50.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.47.440.150,-, kegiatan pengadaan bangunan pembuangan air kotor dengan anggaran sejumlah Rp.55.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.52.183.500,- serta belanja alat listrik dan elektronik sejumlah Rp.50.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.47.395.500,-

Pembangunan Infrastruktur kelurahan menjadi skala prioritas, dimana efisiensi anggaran bisa tercapai dan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang berskala mendesak terkait kepentingan masyarakat itu juga tidak boleh diabaikan. Ada banyak proyek infrastruktur di kelurahan yang mesti segera dibenahi. Misalnya pembenahan saluran drainase di sejumlah wilayah di Kecamatan Madidir. Khususnya di titik-titik rawan terjadi banjir. Fasilitas publik juga harus dibenahi, seperti drainase jalan dan dana yang dialokasikan, penggunaannya harus tepat sasaran dan tidak mengabaikan pembenahan infrastruktur yang menunjang pelayanan kepada masyarakat. Proyek infrastruktur harus tetap menjadi skala prioritas, dalam arti infrastruktur yang sangat mendesak dan berkaitan dengan kepentingan strategis masyarakat.

Laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur beserta program Dana Kelurahan di seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir Kota Bitung di atas, dapat dirangkumkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Implementasi Anggaran Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Infrastruktur di
Kecamatan Madidir Kota Bitung
Tahun 2019

Nama Kelurahan	Tahun 2019			
	Target Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Ratio Efektifitas	Keterangan
Paceda	259.096.000,00	247.820.000,00	95,65%	Efektif
Madidir Unet	259.096.000,00	256.100.000,00	98,84%	Efektif
Madidir Ure	259.096.000,00	256.200.000,00	98,88%	Efektif
Madidir Weru	259.096.000,00	197.847.000,00	76,36%	Kurang Efektif
Kadoodan	259.096.000,00	228.350.000,00	88,13%	Cukup Efektif
Wangurer Barat	259.096.000,00	258.650.000,00	99,83%	Efektif
Wangurer Timur	259.096.000,00	208.530.000,00	80,48%	Cukup Efektif
Wangurer Utara	259.096.000,00	245.847.650,00	94,89%	Efektif
Total	2.072.768.000,00	1.899.344.650,00	91,63	Efektif

Sumber : Data Diolah

Implementasi dana kelurahan yang digunakan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada di masing-masing kelurahan di Kecamatan Madidir dengan ratio efektifitas tertinggi adalah Kelurahan Wangurer Barat dengan presentase mencapai 99,83% yang memanfaatkan dana kelurahan secara efektif sementara ratio efektifitas terkecil adalah Kelurahan Madidir Weru dengan presentase 76,36% yang kurang efektif memanfaatkan dana kelurahan. Namun jika dilihat secara keseluruhan ratio efektifitas dengan presentase sebesar 91,63% dikatakan efektif yaitu ada 6 kelurahan sehingga keberhasilan pembangunan di 8 kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir dikatakan memiliki pencapaian yang maksimal. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas dari pengelolaan dana kelurahan untuk pembangunan infrastruktur berkisar 76,36% sampai dengan 99,83% yang berarti efektif.

Kemudian pada bulan maret tahun 2020, anggaran dana kelurahan dialihkan untuk pencegahan dan penanganan Covid – 19. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Dana Kelurahan hanya diberikan kepada 2 (dua) Kelurahan yaitu Kelurahan Madidir Unet dan Kelurahan Kadoodan yang dijadikan pilot project seperti yang dirangkum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Implementasi Anggaran Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Infrastruktur di
Kecamatan Madidir Kota Bitung
Tahun 2020

Nama Kelurahan	Tahun 2020			
	Target Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Ratio Efektifitas	Keterangan
Madidir Unet	514.886.000,00	491.641.700,00	95,49%	Efektif
Kadoodan	420.000.000,00	400.500.000,00	95,36%	Efektif
Total	934.886.000,00	892.141.700,00	95,43%	Efektif

Sumber : Data Diolah

Implementasi penggunaan dana kelurahan yang dimanfaatkan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada di 2 (dua) kelurahan di Kecamatan Madidir dengan ratio efektifitas pada Kelurahan Madidir Unet yaitu 95,49% dan Kelurahan Kadoodan dengan ratio efektifitas mencapai 95,36%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas dari

pengelolaan dana kelurahan untuk pembangunan infrastruktur berkisar 95,49% dan 95,36% yang berarti efektif.

Implementasi Dana Kelurahan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Madidir Kota Bitung

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan pengembangan masyarakat lewat berbagai macam kegiatan yang direalisasikan oleh pemerintah kelurahan, dengan adanya dana yang di peruntukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di salurkan dari dana kelurahan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilakukan di kelurahan – kelurahan di Kecamatan Madidir Kota Bitung meliputi : Pelatihan Perlindungan dan Pembinaan Masyarakat (linmas), Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat dan Posyandu, Pelatihan Pola Hidup Sehat, Pelatihan Pengomposan, Pelatihan Pembuatan Lubang Resapan Biopori, Pelatihan Pemanfaatan Sektor Pertanian dan Pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Adapun Program Kegiatan Dana Kelurahan Tahun 2019 yang diperuntukkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dilaksanakan di seluruh Kelurahan di Kecamatan Madidir dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 888.331.200,- dan terealisasi sebesar Rp.885.601.350,- adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Implementasi Anggaran Dana Kelurahan Dalam Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Madidir Kota Bitung Tahun 2019

Nama Kelurahan	Tahun 2019			
	Target Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Ratio Efektifitas	Keterangan
Paceda	111.041.400,00	108.352.950,00	97,58%	Efektif
Madidir Unet	111.041.400,00	111.041.400,00	100%	Efektif
Madidir Ure	111.041.400,00	111.000.000,00	99,96%	Efektif
Madidir Weru	111.041.400,00	111.041.400,00	100%	Efektif
Kadoodan	111.041.400,00	111.041.400,00	100%	Efektif
Wangurer Barat	111.041.400,00	111.041.400,00	100%	Efektif
Wangurer Timur	111.041.400,00	111.041.400,00	100%	Efektif
Wangurer Utara	111.041.400,00	111.041.400,00	100%	Efektif
Total	888.331.200,00	885.601.350,00	99,69%	Efektif

Sumber : Data Diolah

1. Kelurahan Paceda

Kelurahan Paceda memanfaatkan dana kelurahan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pelatihan perlindungan dan pembinaan masyarakat (linmas), pelatihan kader Kesehatan masyarakat dan posyandu, pelatihan pengomposan, pelatihan pembuatan lubang resapan biopori dan pelatihan pemanfaatan sektor pertanian dengan target alokasi anggaran sejumlah Rp.111.041.400,- dan terealisasi sejumlah Rp.108.352.950,- serta ratio efektifitas sebesar 97%.

2. Kelurahan Madidir Unet

Kelurahan Madidir Unet memanfaatkan dana kelurahan untuk kegiatan pelatihan pemanfaatan sektor pertanian, pelatihan kader Kesehatan masyarakat dan posyandu, pelatihan pengomposan, pelatihan pembuatan lubang resapan biopori dan pelatihan pola hidup sehat dengan target alokasi anggaran sejumlah Rp.111.041.400,- dan terealisasi sejumlah Rp. 111.041.400,- serta ratio efektifitas sebesar 100%.

3. Kelurahan Madidir Ure

Kelurahan Madidir Ure memanfaatkan dana kelurahan untuk kegiatan pelatihan kader Kesehatan masyarakat dan posyandu, pelatihan pengomposan, pelatihan pembuatan lubang resapan biopori, pelatihan pemanfaatan sektor pertanian, dan pelatihan pola hidup sehat dengan target alokasi anggaran sejumlah Rp.111.041.400,- dan terealisasi sejumlah Rp. 111.000.000,- serta ratio efektifitas sebesar 99,96%.

4. Kelurahan Madidir Weru

Kelurahan Madidir Weru memanfaatkan dana kelurahan untuk kegiatan pelatihan pengomposan, pelatihan pembuatan lubang resapan biopori, pelatihan pemanfaatan sektor pertanian, pelatihan usaha mikro kecil dan menengah dan pelatihan pola hidup sehat dengan target alokasi anggaran sejumlah Rp.111.041.400,- dan terealisasi sejumlah Rp. 111.041.400,- serta ratio efektifitas sebesar 100%.

5. Kelurahan Kadoodan

Kelurahan Kadoodan memanfaatkan dana kelurahan untuk kegiatan pelatihan pemanfaatan sektor pertanian, pelatihan usaha mikro kecil dan menengah, pelatihan pengomposan, pelatihan pembuatan lubang resapan biopori dan pelatihan pola hidup sehat dengan target alokasi anggaran sejumlah Rp.111.041.400,- dan terealisasi sejumlah Rp. 111.041.400,- serta ratio efektifitas sebesar 100%.

6. Kelurahan Wangurer Barat

Kelurahan Wangurer Barat memanfaatkan dana kelurahan untuk kegiatan pelatihan usaha mikro kecil dan menengah, pelatihan pengomposan, pelatihan kader kesehatan masyarakat, pelatihan pembuatan lubang resapan biopori dan pelatihan pola hidup sehat dengan target alokasi anggaran sejumlah Rp.111.041.400,- dan terealisasi sejumlah Rp. 111.041.400,- serta ratio efektifitas sebesar 100%.

7. Kelurahan Wangurer Timur

Kelurahan Wangurer Timur memanfaatkan dana kelurahan untuk kegiatan pelatihan usaha mikro kecil dan menengah, pelatihan pemanfaatan sektor pertanian, pelatihan kader kesehatan masyarakat, pelatihan pembuatan lubang resapan biopori dan pelatihan pola hidup sehat dengan target alokasi anggaran sejumlah Rp.111.041.400,- dan terealisasi sejumlah Rp. 111.041.400,- serta ratio efektifitas sebesar 100%.

8. Kelurahan Wangurer Utara

Kelurahan Wangurer Utara memanfaatkan dana kelurahan untuk kegiatan pelatihan pembuatan lubang resapan biopori, pelatihan pola hidup sehat pelatihan usaha mikro kecil dan menengah, pelatihan pemanfaatan sektor pertanian dan pelatihan kader kesehatan masyarakat dengan target alokasi anggaran sejumlah Rp.111.041.400,- dan terealisasi sejumlah Rp. 111.041.400,- serta ratio efektifitas sebesar 100%.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas dari pengelolaan dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat berkisar 97,58% sampai dengan 100% yang berarti efektif.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang dibahas pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penggunaan dana kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir Kota Bitung dalam rangka pelayanan publik dari segi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dengan persentasi penyerapan secara keseluruhan 90% dan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi dana kelurahan telah terealisasi dan berdampak positif bagi perkembangan pembangunan di masing-masing kelurahan
2. Implementasi dana kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir Kota Bitung dalam rangka pelayanan publik dari segi pemberdayaan masyarakat dengan persentasi penyerapan secara keseluruhan 99,96% dan dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi dana kelurahan berhasil di realisasikan dan berdampak positif bagi perkembangan hidup masyarakat di masing-masing kelurahan.
3. Dari hasil uji efektifitas dari Dana kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir Kota Bitung menunjukkan ratio efektifitas diatas 100% yang artinya dana kelurahan yang ada berjalan secara efektif.

Rekomendasi

1. Diharapkan kedepannya untuk pemerintah daerah kecamatan Madidir agar lebih meningkatkan kinerjanya agar dana yang di salurkan benar-benar bisa terealisasi dengan baik serta tidak salah sasaran terlebih untuk memberdayakan masyarakat setempat didalam memberikan pelatihan agar lebih memperketat pendataan guna pemerataan program, supaya masyarakat yang benar - benar membutuhkan pelatihan khusus untuk menambah pengetahuan di bidang -bidang tertentu dapat benar - benar merasakan manfaat dari adanya dana kelurahan.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap Pemerintah Kecamatan Madidir dalam mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian

permasalahan strategis yang timbul dalam proses peningkatan dana kelurahan serta menunjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kepada peneliti selanjutnya kiranya dapat menjadi bahan pembelajaran dalam melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Aziz, Moh. Ali dkk, 2005, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi, Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara
- Bastian, Indra. 2008. Akuntansi Kesehatan. Jakarta: Erlangga.
- Basuki, sutrisno , 2005 Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta
- Bayu Adi Laksono 2019. *“The community empowerment through social and educational institutions” Jurnal Pendidikan Humaniora Education Journal Of Social Sciences Graduate School Of Universitas Negeri Malang*
- Dewi Septiningsih 2020. *“Analisis perencanaan dana alokasi umum tambahan dalam pelaksanaan pembangunan di desa Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Salatiga” Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga*
- Fayik Ulinuha (2021). Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perspektif Siyash Maliyah (Studi Alokasi Dana di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan). <http://etheses.uin-malang.ac.id/>
- G. Craig. 2002 *“Towards the Measurement of Empowerment: the Evaluation of Community Development” Political Science Journal of the Community Development Society*
- Listyaningsih, 2014. Administrasi Pembangunan, Graha ilmu:Yogyakarta
- Lita Yulita Fitriyani 2020. *“Determinants of Village Fund Allocation” Vol 9, No 3 (2018): Jurnal Akuntansi Multiparadigma*
- Mahmudi, (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Maijon Kinaro 2020. *“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Banda Aceh*
- Masruri. 2014. Analisis Efektifitas Program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan. Padang: Akademia Permata
- Monica Faradila, Achmad Lutfi (2020) *“Analisis Desain Kebijakan Alokasi Bantuan Dana Kelurahan Tahun 2019”* <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article>
- Moh. Nazir. Ph.D. 2013, *“Metode Penelitian”*. Bogor:Ghalia Indonesia
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat.

- Muhtadi dan Tantan Hermansyah, Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam, Jakarta, UIN Jakarta Press, 2013.
- M. Yang. 2011 “Community empowerment in South Korea Towards developing a local model for practice” <https://www.semanticscholar.org/>
- Nafarin. 2000. “Penganggaran Perusahaan”. Jakarta: Salemba Empat
- Ricardo Gottschalk and Padmashree Gehl Sampath. 2021. “Infrastructure for Structural Transformation: A Comeback of Planning?”. *Journal of Infrastructure Development*, 2021, vol. 13, issue 1, 53-64
- Sasongko, Catur dan Parulian, Safrida Rumondang. 2013. Anggaran. Jakarta: Salemba Empat
- Siagian, Sondang P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. membangun masyarakat memberdayakan rakyat, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Taufiq Istianto, Anderson G Kumenaung, Agnes L. Ch. P. Lopian (2021) “Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota di Bolaang Mongondow Raya”. Vol 22, No 3 (2021). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Universitas Sam Ratulangi Manado*
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2011. “Pembangunan Ekonomi”. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2010. “Pembangunan Ekonomi”. Jakarta: Erlangga
- Yulita Marpaung, Debby Ch. Rotinsulu, Ita Pingkan Fasnier Rorong (2020) “Analisis Dampak Penggunaan Dana Desa Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara” Vol 21, No 2 (2020) *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Universitas Sam Ratulangi Manado*
- Zilfa Mundok, Tri Oldy Rotinsulu, Irawaty Masloman (2022) “Pengaruh Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 22 No.3 Bulan April 2022, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

Lampiran Data

1.1 Data Dana Kelurahan di Kecamatan Madidir

Nama Kelurahan	Target Dana	Realisasi Dana
Paceda	370.138.000	356.172.950
Madidir Unet	370.138.000	367.141.400
Madidir Ure	370.138.000	367.200.000
Madidir Weru	370.138.000	308.888.400
Kadoodan	370.138.000	339.391.400
Wangurer Barat	370.138.000	369.691.400
Wangurer Timur	370.138.000	319.571.400
Wangurer Utara	370.138.000	356.889.050
Kec. Madidir	2.961.104.000	2.784.946.000

1.2 Data Anggaran Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat

Nama Kelurahan	Anggaran untuk pembangunan Infrastruktur	Anggaran untuk Pemberdayaan Masyarakat
Paceda	259.096.000	111.041.400
Madidir Unet	259.096.000	111.041.400
Madidir Ure	259.096.000	111.041.400
Madidir Weru	259.096.000	111.041.400
Kadoodan	259.096.000	111.041.400
Wangurer Barat	259.096.000	111.041.400
Wangurer Timur	259.096.000	111.041.400
Wangurer Utara	259.096.000	111.041.400
Kec. Madidir	2.072.768.000	888.331.200